

# LINGKARAN SETAN KEMISKINAN DALAM MASYARAKAT PEDESAAN, STUDI KASUS PETANI TEMBAKAU DI KAWASAN PEDESAAN PULAU LOMBOK

## *The Vicious Circle of Poverty in Rural Society, Case Study of Tobacco Farmers in the Rural Area of Lombok Island*

Muhammad Nurjihadi\*), Arya Hadi Dharmawan

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa

\*) E-mail: [mnurjihadi@gmail.com](mailto:mnurjihadi@gmail.com)

### ABSTRACT

*Poverty is the cause of hunger, marginalization, neglect and the other social problems. Rural area, which most of its people work in agriculture, generally have more poor people than urban area. Lombok Island in NTB Province as one of the main producers of tobacco in Indonesia is one of the region with higher poor people percentage comparing to national percentage of poor people. This research aimed to know the pattern of vicious circle of poverty in tobacco farmers in Lombok Island. This research used qualitative method with descriptive approach. The number of respondents in this research are a hundred persons which were choosed by random sampling. While the research areas were choosed by purposive method. The research result revealed that the tobacco farmers in rural Lombok experienced the new pattern of vicious circle of poverty. Since the farmers had low level of capital, it encourage the farmers to make a collaboration with Tobacco Company which was create the dependence of farmers to tobacco commodity and Tobacco Company. Dependence on Tobacco Company make bargaining positions of farmers low in transaction process which cause the farmers income become low. Low income lead the tobacco farmers to the 'debt trap' and low capital.*

*Keywords: poverty, rural, farmers, tobacco, Lombok*

### ABSTRAK

Kemiskinan adalah penyebab dari kelaparan, marginalisasi dan keterlantaran serta fenomena-fenomena negatif sosial lainnya. Kawasan pedesaan yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian umumnya memberikan sumbangan yang lebih besar dalam hal jumlah penduduk miskin dari pada kawasan perkotaan. Pulau Lombok di NTB sebagai penghasil utama tembakau di Indonesia adalah salah satu daerah dengan prosentase penduduk miskin lebih tinggi dari pada prosentase penduduk miskin nasional. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola lingkaran setan kemiskinan pada petani tembakau di Pulau Lombok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Responden berjumlah seratus orang dipilih secara *random sampling* di wilayah penelitian yang ditentukan secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani tembakau di pedesaan Pulau Lombok mengalami lingkaran setan kemiskinan dengan pola baru. Rendahnya tingkat modal petani mendorong petani untuk bermitra dengan perusahaan tembakau, kemitraan ini kemudian menciptakan ketergantungan petani pada komoditas tembakau dan perusahaan mitra, ketergantungan itu membuat posisi tawar petani lemah dalam proses transaksi yang mengakibatkan rendahnya pendapatan petani, pendapatan yang rendah membuat petani terjebak pada *debt trap* dan tidak mampu mengakumulasi modal, dengan demikian petani kembali memiliki modal yang sangat rendah.

Kata kunci: kemiskinan, pedesaan, petani, tembakau, Lombok

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah penyebab utama kelaparan, keterlantaran, marginalisasi dan penyakit sosial lainnya di seluruh dunia (Naranjo, 2012). Oleh karenanya kemiskinan hingga kini masih menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia. Badan Pusat Statistik [BPS] (2016) mencatat bahwa pada September 2015 terdapat 28.532.570 jiwa masyarakat miskin di Indonesia atau setara dengan 11,2% total penduduk Indonesia. Dari jumlah itu, jumlah penduduk miskin di kawasan pedesaan lebih besar dari pada kawasan perkotaan, yakni berjumlah 17.893.710 jiwa di pedesaan dan 10.619.860 jiwa di perkotaan. Provinsi NTB adalah salah satu penyumbang angka kemiskinan itu dimana pada periode yang sama terdapat 802.290 jiwa masyarakat NTB yang tergolong miskin atau setara dengan 17% dari total penduduk NTB. Kawasan pedesaan di NTB menyumbang angka kemiskinan lebih besar dari pada kawasan perkotaan yakni sebesar 425.010

jiwa sedangkan jumlah orang miskin di kawasan perkotaan NTB sebesar 377.280 orang. Tingginya prosentase penduduk miskin di Provinsi NTB menunjukkan masih tertinggalnya wilayah ini dibanding wilayah lain di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan di Provinsi NTB. Salah satu upaya itu adalah mendorong peningkatan investasi di wilayah Provinsi NTB, terutama investasi dalam bidang pariwisata dan pertanian. Sebagaimana dikatakan Roy dan Pal (2002) bahwa investasi di bidang pertanian jauh lebih efektif dalam meningkatkan produksi pertanian dari pada kebijakan subsidi dimana peningkatan produksi pertanian sangat diperlukan untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan. Investasi bidang pertanian yang berkembang di wilayah Provinsi NTB umumnya berupa perusahaan pengepul produk hasil pertanian, bukan perusahaan industri pengolahan. Khusus di Pulau Lombok, perusahaan pengepul produk pertanian mayoritas

merupakan pengepul komoditas tembakau. Berkembangnya perusahaan-perusahaan pengepul tembakau ini menjadikan provinsi NTB sebagai salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah. Data yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Pusdatin Kementan) menunjukkan bahwa produksi tembakau Provinsi NTB pada tahun 2013 mencapai 61.301 ton yang setara dengan 23,6% total produksi nasional. Jumlah itu merupakan kedua terbanyak setelah Provinsi Jawa Timur yang mampu memproduksi 133.678 ton atau 51,4% dari total produksi nasional pada tahun yang sama. Adapun Jawa Tengah memproduksi 44.224 ton atau setara dengan 17% produksi nasional (Pusdatin Kementan, 2014).

Bagi sebagian masyarakat Pulau Lombok, tembakau merupakan primadona, jalan hidup (*way of life*), sumber pendapatan utama, dan bahkan sudah menjelma menjadi tradisi ekonomi yang sulit dihentikan. Masyarakat bahkan menyebut komoditas tembakau sebagai “emas hijau” karena tingginya nilai ekonomi komoditas tembakau dibanding dengan komoditas pertanian lainnya. Nurjihadi (2011) dalam penelitiannya tentang dampak usahatani tembakau Virginia terhadap perubahan sosial ekonomi pada masyarakat pedesaan di Pulau Lombok menjelaskan bahwa berkembangnya usahatani tembakau Virginia di Pulau Lombok telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan yang dicirikan dengan meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya kualitas perumahan serta meningkatnya pengeluaran masyarakat pedesaan untuk keperluan non pangan.

Keberhasilan pelaku usahatani tembakau dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui komoditas tembakau membuat komoditas tembakau semakin populer dan diidolakan sebagai strategi nafkah (*livelihood strategy*) masyarakat pedesaan di Pulau Lombok. Komoditas ini diusahakan secara turun temurun dalam beberapa dekade yang membuat sebagian masyarakat pedesaan menjadi tergantung pada usahatani ini. Terlebih dengan berkembangnya pola kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) dalam pengusahaan komoditas ini membuat masyarakat tidak hanya tergantung pada komoditas tembakau tapi juga bergantung pada perusahaan mitra sebagai pembeli utama produk tembakau hasil petani. Kondisi ini mirip dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan di Kalimantan Timur yang mengalami perubahan lanskap ekologi dan resiliensi nafkah rumah tangga akibat berkembangnya perkebunan kelapa sawit di mana masyarakat menjadi tergantung pada perusahaan perkebunan itu (Amalia *et al.*, 2015). Pola PIR dalam usahatani tembakau di Pulau Lombok mengharuskan perusahaan mitra untuk memberikan bantuan teknis dan bantuan kredit kepada petani mitranya. Kredit yang diberikan umumnya dalam bentuk penyediaan sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida, benih, dan sebagainya. Selanjutnya petani mitra berkewajiban untuk menjual produknya kepada perusahaan mitra. Dalam proses penjualan produk tembakau kepada perusahaan mitra ini, penghasilan petani akan dipotong sebesar harga sarana produksi yang didapatkan dari perusahaan dalam proses pertanaman. Penentuan harga serta analisis usahatani dilakukan secara sepihak oleh perusahaan mitra yang menyebabkan petani tidak berperan sebagai manajer dalam usahatannya, melainkan sebagai buruh lepas perusahaan (Susrusa dan Zulkifli, 2009).

Meski demikian, studi Susrusa dan Zulkifli (2009) juga menunjukkan bahwa kemitraan dalam usahatani tembakau di Lombok mampu meningkatkan produktifitas dan efektifitas usahatani. Namun demikian rendahnya posisi tawar petani dalam proses penentuan harga dan kuatnya intervensi perusahaan dalam melakukan analisis dan perencanaan usahatani menyebabkan

petani rentan menjadi korban pemiskinan akibat transaksi bisnis yang tidak berimbang. Proses pemiskinan semacam ini dapat menjebak petani dan keluarganya ke dalam lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of poverty*). Sebagaimana dikatakan Sepherd dalam Oluwatayo dan Ojo (2016) bahwa salah satu sebab kemiskinan adalah lemahnya peran kaum miskin dalam proses pengambilan keputusan politik, ekonomi, maupun budaya yang menyangkut kehidupan mereka.

Nurkse (1961) menjelaskan tentang fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di negara-negara miskin. Lemahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan rendahnya kemampuan menabung dan lemahnya kapasitas modal untuk investasi yang berdampak pada rendahnya produktifitas dan akhirnya menyebabkan lemahnya tingkat pendapatan. Proses melingkar itu menyebabkan masyarakat miskin sulit keluar dari kemiskinannya jika tidak ada intervensi dari luar. Dalam konteks ekonomi wilayah, Myrdal (1964) memiliki pemikiran yang serupa dimana lemahnya total tabungan di wilayah miskin menyebabkan minimnya investasi di wilayah itu yang kemudian menyebabkan rendahnya produktifitas wilayah dan kemudian berujung pada lemahnya pendapatan wilayah. Pendapatan wilayah yang lemah kemudian menyebabkan rendahnya tingkat tabungan wilayah dan terus mengikuti lingkaran setan semacam itu. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang paling rentan mengalami lingkaran setan kemiskinan semacam itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah lingkaran setan kemiskinan sebagaimana dinyatakan Nurkse (1961) dan Myrdal (1964) diatas terjadi dalam masyarakat pedesaan Pulau Lombok, khususnya kepada petani tembakau. Selanjutnya penelitian ini juga ditujukan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan pola lingkaran setan kemiskinan yang dialami petani tembakau di Pulau Lombok.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dalam penelitian ini berbentuk data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dari responden melalui wawancara, wawancara mendalam, *Focus Group Discussion* (FGD), dan penelitian berperan serta. Sedangkan data sekunder didapatkan dari institusi-institusi terkait seperti Dinas Perkebunan, BPS dan Perusahaan pengepul tembakau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai dengan April 2013. Penelitian dipusatkan di dua Kabupaten penghasil utama tembakau di Pulau Lombok yakni Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Sampel penelitian ditetapkan dengan *carasimple random sampling*, sementara wilayah sampel ditetapkan secara *purposive*. Kabupaten Lombok Timur diwakili oleh 6 Kecamatan dengan masing-masing kecamatan diwakili oleh 1 sampai 2 desa. Sementara itu Kabupaten Lombok Tengah diwakili oleh 2 kecamatan dengan masing-masing kecamatan dipilih 1 desa sampel. Pemilihan wilayah sampel tersebut didasarkan pada luas areal lahan, jumlah produksi dan jumlah petani di masing-masing wilayah. Wilayah yang dipilih secara *purposive* memiliki keunggulan dalam luas lahan, jumlah produksi maupun jumlah petani dibanding wilayah lainnya. Adapun jumlah total responden adalah 100 orang yang tersebar di 10 desa, 8 kecamatan dan 2 kabupaten di Pulau Lombok. Sementara itu wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci (*key informant*) yang dipilih secara *purposive*. Adapun informan kunci yang terpilih dalam penelitian ini adalah Manager PT. Djarum Lombok, Manager PT AOI Lombok, Ketua Himpunan Petani Tembakau Lombok (Hipetal), Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Wilayah Lombok, dan Pimpinan Dinas Perkebunan Provinsi NTB. Sementara itu

FGD dilakukan sebanyak 3 kali dengan beberapa kelompok tani di wilayah sampel yang berbeda dan 1 kali dengan kelompok pakar yang merupakan informan kunci dan pengambil kebijakan pertembakauan di Provinsi NTB.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengelaborasi proses dan intraksi ekonomi antar pelaku ekonomi tembakau di Pulau Lombok. Analisis difokuskan pada hubungan kemitraan petani dan perusahaan pengepul tembakau dan dampaknya terhadap pendapatan dan kehidupan petani. Data-data kuantitatif akan disajikan untuk memberikan deskripsi dan memperkuat argumen mengenai tema yang dibahas.

### Usahatani Tembakau dan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan Pulau Lombok

Komoditas tembakau mulai ditanam di Pulau Lombok sejak tahun 1969 namun perkembangan yang signifikan terhadap usahatani ini mulai terjadi pada akhir dekade 1980-an (Dinas Perkebunan [Disbun] NTB, 2002). Banyak studi yang menunjukkan bahwa hadirnya usahatani tembakau maupun berkembangnya pola kemitraan dalam usahatani tembakau di Pulau Lombok telah berhasil meningkatkan pendapatan, efisiensi, dan produktifitas petani sebagaimana ditunjukkan oleh studi Nurjihadhi (2011), Hamidi (2009), serta Susrusa dan Zulkifli (2009).

Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan taraf hidup petani akibat berkembangnya usahatani tembakau itu juga menyebabkan petani dan masyarakat pedesaan secara umum menjadi tergantung pada komoditas tembakau dan perusahaan mitra. Ketergantungan itu terjadi karena perusahaan mitra memberikan bantuan kredit sarana produksi kepada petani, kredit itu harus dilunasi petani pada saat penjualan produk hasil tembakaunya kepada perusahaan. Banyak responden mengatakan bahwa sering kali nilai jual tembakau mereka lebih rendah dari pada total kredit yang mereka terima dari perusahaan dalam bentuk sarana produksi pertanian. Dengan demikian, di akhir musim tanam, petani lebih sering menyisakan hutang dari pada untung. Untuk membayar hutang tersebut, petani tidak memiliki alternatif yang lain selain mengusahakan kembali komoditas tembakau yang sebagian sarana produksinya menggunakan kredit dari perusahaan mitra. Kondisi ini menunjukkan adanya jebakan hutang (*debt trap*) petani dalam mengusahakan usahatani tembakau di Pulau Lombok yang membuat para petani tersebut tergantung pada usahatani tembakau.

Oluwatayo (2016) dalam penelitiannya di Afrika menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat Afrika terhadap sektor pertanian akibat minimnya sumber penghasilan lain memiliki kontribusi cukup signifikan dalam menyebabkan kemiskinan di Afrika. Sementara Belem *et al* (2011) dalam penelitiannya di Burkina Faso menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan di Burkina Faso adalah hutang. Dengan demikian *debt trap* yang dihadapi oleh petani tembakau di Pulau Lombok mendorong mereka untuk menjadi masyarakat miskin. Selama alternatif pilihan ekonomi masih terbatas, kemiskinan petani tembakau ini akan terus berlanjut dan bahkan dapat diwariskan.

### Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Usahatani Tembakau di Pulau Lombok

Kemiskinan memiliki definisi yang beragam. World Bank mendefinisikan kemiskinan dengan menggunakan indikator daya beli dimana seseorang dikatakan miskin jika kemampuan daya belinya dibawah \$2 per kapita per hari dan dikatakan miskin absolut jika pengeluarannya dibawah \$1 per kapita per hari (World Bank, 2000). Sementara itu BPS di Indonesia mendefinisikan kemiskinan dengan mengacu pada konsep garis kemiskinan yang



Gambar 1. Lingkaran Setan Kemiskinan dalam Usahatani Tembakau di Pulau Lombok

mengukur tingkat kemiskinan dengan berdasarkan perhitungan kebutuhan kalori per orang per hari. Adapun standar kebutuhan kalori yang menjadi patokan adalah 2100 kalori per kapita per hari. Selain itu, standar garis kemiskinan oleh BPS juga ditambah dengan indikator kebutuhan dasar bukan makanan yang meliputi kebutuhan sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan (Purwanto, 2007). Meski demikian, Warr (2011) mengatakan bahwa seseorang yang dikategorikan miskin dengan menggunakan satu indikator cenderung untuk tetap dikategorikan miskin dengan menggunakan alat ukur lainnya. Dengan demikian meskipun alat ukur kemiskinan berbeda-beda, tapi secara substansi kemiskinan bermakna sama yakni ketidak mampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya seperti makanan, pakaian, kesehatan, perumahan, rasa aman, dan akses terhadap pendidikan.

Sheperd *et al* dalam Oluwatayo (2016) mengidentifikasi tiga faktor utama yang menyebabkan kemiskinan yaitu kurangnya aset, tidak dilibatkannya mereka dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi maupun budaya, serta kebijakan ekonomi makro dan norma-norma sosial yang cenderung merugikan golongan masyarakat miskin. Sementara itu Mosley (2001) menyatakan bahwa bisnis sektor pertanian merupakan bisnis yang berisiko, terutama bagi petani kecil di negara-negara miskin. Tingginya risiko bisnis pertanian yang tidak diimbangi dengan kemampuan petani dalam mengelola risiko itu membuat petani dan masyarakat pedesaan terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan.

Dalam kasus petani tembakau di Pulau Lombok, lingkaran setan kemiskinan terjadi dengan dimulai dari rendahnya tingkat modal petani, baik modal Sumber Daya Manusia (SDM), modal finansial maupun modal Sumber Daya Alam (SDA). Rendahnya modal itu kemudian mendorong petani untuk mengusahakan usahatani tembakau melalui pola kemitraan dengan perusahaan-perusahaan pengepul tembakau yang beroperasi di Pulau Lombok. Selanjutnya hubungan kemitraan itu menyebabkan petani mengalami ketergantungan dengan usahatani tembakau maupun dengan perusahaan-perusahaan mitra tersebut. Ketergantungan ini membuat posisi tawar petani menjadi lemah dalam transaksi produk tembakau sehingga berakibat pada rendahnya pendapatan petani. Pendapatan yang rendah membuat petani tidak mampu membayar hutang-hutangnya untuk keperluan modal usahatani tembakau tersebut yang membuat petani mengalami *debt trap*. Pendapatan yang rendah serta hutang membuat petani tidak mampu mengakumulasi modal sehingga mereka tetap berada pada kondisi modal yang rendah. Pada sisi yang lain,

menumpuknya hutang dan minimnya modal itu membuat petani kembali mengusahakan tembakau melalui pola kemitraan dengan perusahaan pengepul tembakau. Fenomena melingkar ini menjelaskan kenapa komoditas tembakau yang disebut “emas hijau” itu tidak mampu menurunkan jumlah kemiskinan di pedesaan Pulau Lombok. Untuk mudahnya, fenomena lingkaran setan kemiskinan itu dapat dilihat dalam gambar.

### Aset dan Modal yang Minim

Sebagian besar petani tembakau merupakan petani kecil dengan luas lahan dibawah 1 hektar. Petani kecil semacam ini memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengakumulasi modal karena lemahnya mereka dalam persaingan usaha yang kapitalis (Batou, 2015). Untuk mengusahakan tembakau, para petani itu umumnya menyewa lahan untuk mencapai skala ekonomi yang menguntungkan. Rendahnya modal yang dimiliki petani membuat petani tersebut harus berhutang untuk dapat menyewa lahan. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap usahatani tembakau membuat harga sewa lahan untuk keperluan pertanaman tembakau jauh lebih mahal dari pada harga sewa lahan untuk keperluan pertanaman komoditas lainnya. Hal ini membuat biaya produksi tembakau yang didapatkan petani dari hutang menjadi sangat mahal.

Modal yang dimaksud disini tidak sekedar bermakna modal keuangan, tapi juga modal SDM dan modal SDA. Modal SDM menyangkut pengetahuan, keterampilan dan produktifitas manusia yang di era modern ini menjadi faktor penentu kemajuan suatu wilayah (Husak, 2012). Modal SDM yang rendah dari petani tembakau di Pulau Lombok ditunjukkan dengan ketidakmampuan petani dalam menemukan strategi nafkah yang lain selain usahatani tembakau. Adapun komoditas pertanian lainnya diusahakan hanya pada saat kondisi cuaca tidak sesuai untuk pertanaman tembakau, yakni pada musim hujan yang lebih cocok untuk menanam padi. Hal ini disebabkan karena usahatani tembakau telah berkembang sejak lama yang *skill* teknisnya diwariskan turun temurun. Dengan demikian, secara teknis petani sulit mengembangkan komoditas pertanian lain karena minimnya pengetahuan dan keterampilan petani untuk membudidayakan komoditas lain tersebut. Selain itu, kondisi alam yang kering juga menyulitkan petani untuk membudidayakan komoditas pertanian lainnya. Untuk diketahui, tanaman tembakau sangat cocok ditanam di daerah yang agak kering namun lembab. Hal ini menunjukkan bahwa modal SDA di kawasan pedesaan Pulau Lombok lebih mendukung untuk pertanaman tembakau daripada komoditas lainnya. Kondisi seperti ini menurut Jalan dan Ravallion (2002) menunjukkan adanya *geographic poverty traps*.

Selain itu, tanaman tembakau juga membutuhkan perawatan intensif, berisiko tinggi dan menuntut fokus total dalam proses budidaya maupun pengolahan pasca panennya. Perawatan intensif yang dimaksud adalah pemupukan, pengendalian hama penyakit, menjaga pertumbuhan vegetatif dan mencegah pertumbuhan generatif, penyiangan, penyiraman, menjaga kelembaban tanah, serta perlakuan-perlakuan pasca panen seperti pengovenan, *grading*, pengemasan, dan pengiriman produk tembakau ke perusahaan. Perawatan intensif itu disertai dengan biaya produksi dan biaya sosial yang sangat tinggi akibat kerusakan lingkungan dan modal sosial yang melemah. Kondisi semacam itu tidak hanya dialami petani tembakau di Pulau Lombok, tapi juga dialami oleh petani tembakau di India sebagaimana dijelaskan Suvarna dan Thomas (2003) dalam laporan penelitian lintas negara yang diikutinya. Perawatan intensif itu tentu tidak mampu dikerjakan sendiri oleh petani, sehingga petani menggunakan jasa buruh tani yang dibayar borongan, harian, maupun dijadikan buruh tetap selama satu

musim tanam. Petani yang umumnya memiliki modal minim itu kemudian membayar buruh-buruhnya dengan menggunakan dana pinjaman (kredit) baik dari lembaga keuangan, perorangan, maupun perusahaan mitra. Adanya bantuan kredit dari perusahaan mitra serta terjaminnya tujuan pasar petani melalui kemitraan membuat banyak petani bergabung menjadi mitra perusahaan pengepul tembakau di Pulau Lombok.

### Kemitraan dengan Perusahaan Pengepul Tembakau

Pola kemitraan yang dikembangkan dalam usahatani tembakau di Pulau Lombok adalah pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR). Pola ini menjadikan para petani tembakau sebagai plasma dari perusahaan inti, yakni perusahaan pertembakauan. Pola PIR ini dikembangkan oleh World Bank sejak 1986 yang memungkinkan petani untuk menjual produk hasil pertaniannya kepada perusahaan inti melalui kontrak kerjasama (Collin, 2001). Sebagai mitra, perusahaan inti akan membeli produk tembakau hasil panen petani. Selain itu perusahaan inti ini juga memberikan bantuan teknis kepada petani melalui penyuluhan lapang, penyediaan sarana kredit, dan pengembangan inovasi teknologi. Petani sebagai plasma memiliki peran sebagai pemasok produk tembakau kepada perusahaan tersebut dengan mengikuti arahan dan standar perusahaan. Dalam praktek, pola kemitraan ini lebih memperlihatkan petani sebagai buruh perusahaan yang dibayar tanpa standar dengan keuntungan usahatani yang belum tentu didapat petani.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa petani sangat bersemangat untuk menjadimitra atau plasma dari perusahaan karena adanya jaminan pasar dan ketersediaan kredit sarana produksi pertanian bagi petani. Bantuan kredit ini bisa meringankan beban modal petani, baik modal SDM maupun modal finansialnya. Modal SDM menjadi ringan karena adanya bimbingan teknis oleh penyuluh perusahaan, sementara modal finansial menjadi ringan karena adanya bantuan kredit sarana produksi pertanian. Berdasarkan hasil penelitian, kredit yang diterima petani dari perusahaan mitra hanya kredit agroinput (sarana produksi di ladang), itu pun tidak 100%. Masing-masing petani mendapatkan kredit dengan nilai yang berbeda-beda, tergantung dari hasil evaluasi perusahaan terhadap petani mitranya. Petani yang dianggap taat dan mengikuti himbuan-himbuan perusahaan diberikan alokasi kredit agroinput yang lebih besar. Jumlah kredit agroinput yang diberikan berkisar antara 20%-80%. Sementara biaya untuk membayar tenaga kerja, sewa lahan, pengolahan lahan, pemeliharaan oven, dan sebagainya ditanggung sendiri oleh petani.

Petani umumnya meminjam uang kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan non agroinput maupun kebutuhan agroinput yang tidak dibiayai oleh perusahaan. Pinjaman dari pihak lain inilah yang sering menjerat petani ke dalam jebakan hutang yang tidak disadari. Kebanyakan petani meminjam uang untuk membiayai usahatannya kepada orang-orang terdekat, baik keluarga, tetangga, maupun sahabat. Modal yang dipinjam secara kekeluargaan cenderung tidak memperhatikan tingkat bunga, padahal jika dihitung nilai bunganya bisa mencapai 50% atau lebih. Bunga yang dibayarkan dianggap sebagai pemberian sukarela atau ucapan terimakasih. Sebagian petani bahkan meminjam uang kepada penyandang dana khusus dengan bunga yang tinggi (*moneylender*), baik lembaga finansial maupun individu. Petani bahkan memberikan julukan “Bank 46” kepada orang-orang yang memberikan pinjaman uang untuk pembiayaan usaha tembakaunya. Bank 46 artinya, minjam empat kembali enam. Sederhananya, peminjaman itu dikenakan bunga 50%. Bahkan sebagian petani yang menjadi responden dalam penelitian ini menyebut ada juga Bank 12,

minjam satu kembali dua. Artinya bunga pinjamannya mencapai 100%. Kondisi ini umum dialami masyarakat petani di pedesaan sebagaimana hasil penelitian Sadanandan (2014) di India.

### **Ketergantungan Petani kepada Komoditas Tembakau dan Perusahaan Mitra**

Ketergantungan petani pada komoditas tembakau di Pulau Lombok terjadi karena beberapa faktor yakni faktor agroklimat, faktor teknis, serta faktor ekonomis. Menurut informan kunci, kondisi iklim Pulau Lombok secara umum merupakan kondisi terbaik untuk pertumbuhan tembakau jenis virginia. Selain itu jenis dan keadaan tanah di Pulau Lombok juga menjadikan tembakau virginia memiliki cita rasa yang khas dan berkualitas. Musim panas yang relatif lebih lama namun kelembaban tanah tetap terjaga merupakan keunggulan agroklimat pulau Lombok. Kondisi seperti itu sangat sesuai untuk tanaman tembakau. Dengan demikian, ketergantungan petani pada usahatani tembakau sebenarnya merupakan imbas dari ketergantungan terhadap kondisi SDA. Jika kondisi SDA itu mengalami perubahan, masyarakat akan menyesuaikan *livelihood* sistemnya dengan menemukan *livelihood strategy* yang baru sebagaimana ditunjukkan dalam studi Mahdi *at al* (2009) di Sumatra Barat, Indonesia.

Disamping karena faktor agroklimat tersebut, ketergantungan pada usahatani tembakau di masyarakat pedesaan Pulau Lombok juga disebabkan karena alasan teknis. Meski usahatani tembakau disebut sebagai usaha yang ribet, banyak pekerjaan dan melelahkan, namun menurut sebagian besar responden tembakau merupakan usaha yang paling memungkinkan untuk dilakukan karena sudah dikuasai secara teknis. Hal ini dapat dipahami mengingat adanya proses pembentukan tradisi akibat diusahakannya tembakau secara turun temurun oleh petani. Suatu aktifitas yang disaksikan dan dilakukan secara berulang-ulang akan membuat seseorang menjadi terampil dalam aktifitas tersebut. Petani-petani tembakau Lombok sudah cukup menguasai urusan teknis usahatani tembakau. Jika para petani tembakau itu dipaksa untuk mengusahakan yang lain, meski yang pekerjaannya lebih sederhana daripada tembakau, petani itu merasa tidak mampu melakukannya.

Ketergantungan pada usahatani tembakau itu kemudian diperparah oleh keberadaan perusahaan perusahaannya pengepul tembakau di Pulau Lombok yang memberikan bantuan kredit dan jaminan pasar kepada petani. Jika petani menanam komoditas pertanian lain, belum tentu akan ada yang membeli produk tersebut. Jikapun ada yang membeli, nilainya tidak seberapa menurut perhitungan petani. Dengan demikian ketergantungan petani pada usahatani tembakau sebenarnya juga merupakan ketergantungan pada perusahaan mitra. Kondisi ini berbanding terbalik dengan temuan Beach *at al* (2008) di Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa petani tembakau di negara tersebut berhasil melakukan diversifikasi sumber penghasilan dan melepaskan ketergantungannya dari usahatani tembakau.

### **Posisi Tawar yang Rendah dalam Transaksi di Pasar Tembakau**

Ketergantungan petani pada usahatani tembakau dan perusahaan mitra sebagaimana dijelaskan diatas membuat posisi tawar petani dalam transaksi di pasar tembakau menjadi lemah. Hal ini terjadi karena petani merasa lebih membutuhkan perusahaan daripada perusahaan membutuhkan petani. Akibatnya perusahaan menjadi superior dalam proses transaksi dimana keputusan tingkat harga tembakau ditentukan oleh perusahaan. Perusahaan juga menjadi penentu seberapa besar kredit sarana produksi yang bisa diberikan

kepada petani. Hyvonen (1995) menjelaskan bahwa posisi tawar mempengaruhi daya kompetitif dari pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi. Dengan demikian petani tembakau di pedesaan Pulau Lombok hanya bisa mengikuti arah kebijakan perusahaan. Sebisa mungkin petani akan berusaha untuk menjadi mitra yang baik dengan tidak melawan perusahaan karena aspek ketaatan pada perusahaan menjadi salah satu indikator penentu harga tembakau petani dan jumlah kredit yang bisa diterima petani dari perusahaan.

Sebagai mitra perusahaan, petani diwajibkan menjual produk tembakaunya hanya ke perusahaan mitra. Sementara itu tingkat harga disesuaikan dengan kualitas hasil tembakau yang dijual petani. Adapun proses penentuan kualitas tembakau dilakukan oleh perusahaan secara subjektif pada saat transaksi di gudang milik perusahaan. Penilaian terhadap kualitas yang kemudian mempengaruhi harga tembakau petani yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan merupakan bentuk dari lemahnya posisi tawar petani dalam transaksi tersebut. Meskipun ada kemungkinan untuk petani yang tidak setuju dengan penilaian subjektif perusahaan dapat membatalkan transaksi dan membawa pulang tembakaunya, namun petani sudah dirugikan dengan biaya transportasi dan biaya buruh untuk mengangkut tembakaunya.

Sering kali petani terpaksa harus menerima harga yang ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan karena pertimbangan biaya, bayar hutang, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena petani tidak punya banyak pilihan untuk menjual tembakaunya. Perusahaan yang lain umumnya hanya membeli tembakau dari petani mitranya. Kondisi semacam ini menunjukkan ketidak berdayaan petani menghadapi superioritas perusahaan. Secara umum, kondisi lemahnya posisi tawar petani ini disebabkan karena minimnya informasi pasar yang diterima petani sebagaimana dilaporkan oleh *Agriculture Week* (2015).

Lemahnya posisi tawar petani juga dapat dilihat dari kuatnya intervensi perusahaan dalam proses pertanaman di ladang. Petani diharuskan untuk mengikuti arahan perusahaan dalam proses pembibitan, pemeliharaan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, panen, bahkan perlakuan pasca panen. Hal ini dilakukan agar tembakau yang dihasilkan petani sesuai dengan standar perusahaan. Ironisnya, meski sudah mengikuti arahan teknis perusahaan, jika hasil produksi petani tidak sebagus yang diharapkan perusahaan, tidak ada bentuk kompensasi dari perusahaan. Harga pembelian tembakau petani tetap dilakukan dengan mengacu pada kualitas produk. Lemahnya posisi tawar ini membuat pendapatan petani menjadi rendah dan akhirnya termiskinkan.

### **Pendapatan yang Rendah**

Posisi tawar yang lemah menyebabkan pendapatan petani menjadi rendah. Meski demikian perlu dipahami bahwa jika usahatani tembakau tidak berkembang di Pulau Lombok, kemiskinan yang dilami petani dan masyarakat pedesaan pada umumnya mungkin akan lebih parah. Hanya saja hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berkembangnya usahatani tembakau itu hanya memberikan alternatif pilihan ekonomi kepada petani tanpa mampu mengurangi tingkat kemiskinan itu secara signifikan. Hal ini terjadi karena struktur pasar yang bersifat *monopsony*. Studi Makbul *at al* (2015) membuktikan bahwa struktur pasar yang *monopsony* cenderung menyebabkan rendahnya pendapatan petani.

Lebih jauh, penelitian ini justru menemukan indikasi bahwa berkembangnya usahatani tembakau di Pulau Lombok telah membentuk pola baru lingkaran setan kemiskinan di masyarakat

Tabel 1. Analisis usahatani tembakau virginia Lombok untuk petani pengomprong bermitra

No	Komponen Pembiayaan	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Lahan	
	- Sewa lahan untuk pembibitan	160.000,-
	- Sewa lahan untuk penanaman	8.000.000,-
	- Bunga 25%	2.040.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>10.200.000,-</b>
2.	Biaya Agroinput	
	- Pembibitan	525.330,-
	- Penanaman	6.891.000,-
	- Processing pasca panen	9.434.500,-
	- Bunga 5%	842.541,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>17.693.372,-</b>
3.	Biaya Tenaga Kerja	
	- Pembibitan	350.000,-
	- Penanaman	11.375.000,-
	- Processing pasca panen	3.380.000,-
	- Bunga 25%	3.776.250,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>18.881.250,-</b>
4.	Biaya Pengairan	
	- Pengairan	600.000,-
	- Bunga 25%	150.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>750.000,-</b>
5.	Biaya Penyusutan dengan bunga 25%	40.625,-
6.	Biaya Renovasi Oven	
	- Renovasi oven	2.000.000,-
	- Bunga 25%	500.000,-
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>2.500.000,-</b>
	<b>Total Biaya Produksi</b>	<b>50.024.622,-</b>
	<b>Total penerimaan = 2.000 X 27.000,-</b>	<b>54.000.000,-</b>
	<b>Total Keuntungan per musim tanam</b>	<b>3.975.379,-</b>
	<b>R/C Ratio</b>	<b>1, 08</b>

Sumber: Data Primer diolah (2013)

pedesaan Pulau Lombok. Sebagai gambaran tingkat keuntungan petani, perhatikan tabel 1 mengenai analisis usahatani untuk petani-pengomprong bermitra. Perlu diketahui bahwa tidak semua petani tembakau di Lombok bermitra dengan perusahaan pengepul tembakau tertentu, sebagian petani merupakan petani swadaya yang tidak memiliki ikatan kemitraan dengan perusahaan manapun. Para petani swadaya ini umumnya mengapatkan tingkat keuntungan yang lebih rendah dari pada petani bermitra. Sementara itu, pengomprong adalah istilah untuk orang yang mengeringkan tembakau dengan cara di oven. Perusahaan tembakau di Pulau Lombok hanya membeli tembakau yang sudah di oven. Tidak semua petani memerankan fungsi sebagai pengomprong. Dalam analisis usahatani pada tabel 1 diasumsikan bahwa semua petani adalah petani-pengomprong bermitra.

Biaya renovasi oven dimasukkan dalam struktur biaya usahatani dalam analisis diatas didasarkan pada data primer di mana 100% responden mengaku harus mengganti tungku oven hampir setiap tahun. Pasca dicabutnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus untuk omperongan tembakau, pemerintah, perusahaan dan akademisi terus berupaya mencari alternatif bahan bakar yang lain. Hampir setiap tahun dilakukan ujicoba terhadap satu jenis bahan bakar yang konsekuensinya adalah oven harus dimodifikasi agar sesuai dengan bahan bakar yang digunakan. Pada tahun 2009, pemerintah daerah pernah menganggarkan untuk membantu biaya modifikasi oven pengomprong, namun karena terus terjadi perubahan dalam penggunaan bahan bakar setiap tahun, maka pemerintah menghentikan bantuan biaya modifikasi oven tersebut. Akibatnya pengomprong harus mengupayakan sendiri biaya modifikasi ovennya. Menurut pengakuan responden, setiap

tahun pengomprong harus mengeluarkan biaya sekitar 1 juta – 8 juta rupiah untuk keperluan modifikasi oven. Sebagian responden juga mengaku tidak harus memodifikasi ovennya setiap tahun, terkadang satu jenis modifikasi bisa dipakai untuk dua atau tiga kali musim tanam tembakau. Penulis mengambil nilai rata-rata terkecil dalam laporan penelitian ini, yaitu Rp 2.000.000,-, meskipun pada faktanya angka rata-rata untuk keperluan modifikasi oven sebenarnya sangat mungkin lebih besar dari itu.

Berdasarkan data diatas, didapatkan informasi bahwa nilai keuntungan petani pengomprong yang bermitra dengan perusahaan rata-rata hanya sebesar Rp 3.975.379,- per hektar per musim tanam. Artinya nilai keuntungan petani pengomprong bermitra hanya Rp 795.075,- per bulan per hektar. Berdasarkan data hasil penelitian, luas areal tanam rata-rata responden adalah 1,76 hektar. Hal itu berarti nilai keuntungan riil petani pengomprong yang bermitra dengan perusahaan adalah Rp 1.399.333,-. Angka ini sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB tahun 2016 yang sebesar Rp 1.485.000,-. Fakta ini membuktikan temuan *Southeast Asia Tobacco Control Alliance* [SEATCA] (2008) bahwa petani dan pekerja tembakau di negara berkembang sama sekali tidak mendapatkan keuntungan yang tinggi dari usahanya meskipun tembakau adalah komoditas bernilai tinggi. Omset petani dari menjual tembakau memang tinggi, tapi biaya produksinya juga sangat tinggi dengan tingkat kepadatan aktifitas yang sangat tinggi. Fenomena ini menunjukkan adanya *self exploitation* yang dialami oleh petani tembakau.

Angka-angka diatas sesungguhnya belum memperhitungkan besarnya pengeluaran petani untuk keperluan makanan buruh. Petani sering kali mengeluhkan soal besarnya anggaran tak terduga yang dikeluarkan untuk konsumsi buruh ketika sedang bekerja. Para petani itu menolak untuk memasukkan pengeluaran konsumsi itu sebagai salah satu pos biaya dalam analisis usahatani tembakaunya. Penulis sengaja tidak memasukkan angka itu dalam laporan penelitian ini mengingat tidak ada data pasti dan valid tentang seberapa besar pengeluaran petani untuk keperluan konsumsi buruh itu. Besaran biaya konsumsi itu sangat bergantung dari karakter dan kebiasaan masing-masing petani. Selain itu besaran biaya konsumsi itu juga sering dipengaruhi oleh kondisi-kondisi tidak terduga, misalnya secara tiba-tiba pedagang keliling datang ke tempat bekerja untuk berjualan, pada saat itu para buruh akan meminta untuk dibelikan makanan tersebut, maka dengan terpaksa petani membelikan makanan itu agar tidak dianggap pelit dan agar buruh bisa lebih semangat dalam bekerja. Sekali lagi, tidak ada angka yang pasti untuk keperluan pembiayaan konsumsi buruh ini. Jika pengeluaran ini diperhitungkan, maka dapat dipastikan tingkat keuntungan petani akan berkurang signifikan.

Tingkat keuntungan yang rendah itu tentu saja tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Oleh karenanya, berdasarkan hasil wawancara, petani sering kali mencampurkan uang modal usahatani dengan uang keperluan hidupnya. Artinya tidak jarang uang yang dipinjam untuk keperluan usahatannya digunakan juga untuk keperluan sehari-hari rumah tangga petani. Kondisi ini membuat petani tidak mampu membayar hutang modal usahatannya di akhir musim tanam karena hasil penjualan tembakaunya tidak sebanding dengan total hutang usahatani tersebut.

### Jebakan Hutang (*debt trap*)

Penumpukan hutang akibat rendahnya pendapatan petani itu membuat petani terjebak pada kubangan hutang yang terus membesar setiap tahun. Jika terus mengalami penumpukan

hutang semacam itu, pemberi hutang seharusnya tidak lagi memberikan pinjaman kepada petani tersebut. Namun dalam kasus ini menurut hasil wawancara mendalam dengan beberapa petani, mengusahakan tembakau adalah sumber *trust* bagi pemberi pinjaman. Artinya jika diketahui peminjam uang itu adalah petani tembakau dan pinjamannya akan digunakan untuk usahatani tembakau, maka pemberi pinjaman tidak akan ragu untuk meminjamkan uangnya karena besarnya ekspektasi akan hasil dari usahatani tembakau itu. Perlu digaris bawahi bahwa pemberi pinjaman yang dimaksud disini bukanlah lembaga keuangan formal melainkan penyedia jasa pinjaman informal (*informal credit system*) yang terdiri dari *moneylender* perorangan ataupun lembaga. *Informal credit system* ini umum berlaku di masyarakat pedesaan yang memiliki modal minim namun tidak mampu mengakses lembaga keuangan formal sebagaimana ditunjukkan dalam studi Ruddle (2011) di Vietnam yang menegaskan semakin sulitnya petani dan nelayan keluar dari kemiskinannya akibat sulitnya mengakses lembaga keuangan formal dan terpaksa menggunakan *informal credit system* yang cenderung menerapkan bunga tinggi.

Menumpuknya hutang membuat beban hidup petani menjadi semakin berat. Mengingat tidak adanya kemampuan petani untuk membayar hutangnya dari sumber lain, maka petani terpaksa harus mengusahakan kembali usahatani tembakau pada musim tanam berikutnya. Karena tidak memiliki modal, maka petani akan kembali mengandalkan dana pinjaman untuk menjalankan usahataniannya itu. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bermitra dengan perusahaan adalah pilihan terbaik petani mengingat bermitra memberikan jaminan pasar dan sumber sebagian modal (kredit) petani. Selanjutnya kemitraan ini kembali menyebabkan ketergantungan, lemahnya posisi tawar, rendahnya pendapatan, serta penumpukan hutang. Fenomena melingkar ini terus terjadi secara berulang-ulang. Karena itulah saya menyebut temuan ini sebagai pola baru lingkaran setan kemiskinan di masyarakat pedesaan, khususnya para petani tembakau di Pedesaan Pulau Lombok.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan kembali fenomena lingkaran setan kemiskinan yang menjerat masyarakat miskin di seluruh dunia. Lebih dari itu, penelitian ini memberikan cara pandang dan perspektif baru terhadap teori lingkaran setan kemiskinan. Terdapat banyak perspektif tentang teori lingkaran setan kemiskinan sebagaimana diungkapkan oleh Nurkse (1961) dan Myrdal (1964) yang menekankan teori lingkaran setan kemiskinan pada rendahnya produktifitas masyarakat miskin yang menyebabkan pendapatannya rendah dan kemampuan akumulasi modalnya terbatas. Sementara itu Mosley (2001) menekankan pada rendahnya kemampuan petani dalam mengelola risiko pada usaha pertanian yang sangat berisiko menjadi penyebab utama lingkaran setan kemiskinan petani kecil di negara-negara miskin. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada munculnya ketergantungan petani sebagai masyarakat miskin kepada perusahaan sebagai pemilik modal besar yang membeli produk hasil petani yang kemudian menyebabkan rendahnya posisi tawar petani. Posisi tawar yang rendah selanjutnya menyebabkan pendapatan rendah, penumpukan hutang, dan kemampuan akumulasi modal yang sangat terbatas. Dengan demikian lingkaran setan kemiskinannya menjadi sempurna dimana petani kembali ke kondisi asalnya, yaitu memiliki modal yang rendah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2016. Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2013-2015. BPS. [internet]. [14/06/2016]. Diunduh dari [www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119](http://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1119)
- [Disbun NTB] Dinas Perkebunan Provinsi NTB. 2002. Makalah Kebijakan Pengembangan Tembakau Virginia Lombok Melalui Program Intensifikasi Tembakau Virginia Lombok. Disbun NTB. Mataram.
- [Pusdatin Kementan] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian RI. 2014. Outlook Komoditi Tembakau. Kementerian Pertanian RI. Jakarta
- [SEATCA] Southeast Asia Tobacco Control Alliance. 2008. Cycle of Poverty in Tobacco Farming: Tobacco Cultivations in Southeast Asia. SEATCA. Bangkok.
- Agriculture Week. 2015. Agricultural Economics; New Agricultural Economics Study Results Reported from French National Institute for Agricultural Research (INRA) (Farmer Bargaining Power and Market Information Services). NewsRx. Atlanta.
- Amalia R, Dharmawan A.H, Putri E.I.K. 2015. Perubahan Lanskap Ekologi dan Resiliensi Nafkah Rumahtangga Petani di Sekitar Hutan di Kalimantan Timur. *Sodality*. Vol. 03/03. pp. 121-127.
- Batou, Jean. 2015. Accumulation by Dispossession and Anti-Capitalist Struggles: A Long Historical Perspective. *Journal of Science and Society*. Vol. 79/1. pp. 11-37.
- Beach R.H, Jones A.S. dan Tooze J.A. 2008. Tobacco Farmer Interest and Succes in Income Diversifications. *Journal of Agricultural and Applied Economic*. Vol. 40/1. pp. 53-71.
- Belem M, Bayala J, dan Kalinganire A. 2011. Defining the poor by the rural communities of Burkina Faso: implications for the development of sustainable parkland management. *Springer Science and Business Media*. Vol. 83/3. pp. 287-302.
- Collin, Elizabeth F. 2001. Multinational Capital, New Order Development and Democratization in South Sumatra. *Cornell Southeast Asia Program*. Vol. 71. pp. 11-133.
- Hamidi, Hirwan. 2009. Dampak Kemitraan Terhadap Efisiensi Usahatani Tembakau Virginia di Pulau Lombok Provinsi NTB. *Agroteksos*. Vol. 19/1-2. pp. 42-47.
- Husak, Jacob. 2012. Synergy of Social and Human Capital in Rural Development-Czech and German Case. *Journal of European Countryside*. Vol. 4. pp. 240-250.
- Hyvonen, Saara. 1995. Competitive Advantage, Bargaining Power, and Organizational Performance: The Case of Finnish Food Manufacturing Firms. *Journal of Agribusiness (1986-1998)*. Vol. 11/4. pp. 333-348.
- Jalan J, dan Ravallion M. 2002. Geographic Poverty Traps? A Micro Model of Consumption Growth in Rural China. *Journal of Applied Econometrics*. Vol. 17/4. pp. 329-346.
- Mahdi, Shivakoti, Ganesh P, Schmidt-vogt, dan Dietrich. 2009. Livelihood Change and Livelihood Sustainability in the Uplands of Lembang Subwatershed, West Sumatra, Indonesia, in a Changing Natural Resource Management Context. *Journal of Environmental Management*. Vol. 43/1. pp. 84-99.
- Makbul Y, Pradono, Ratnaningtyas S, Dwiyanoro P. The Effect of Market Structure on The Integration of Rice

- Prices With Paddy Prices and its Impact on Farmers Family Income in the Kroya District, Indramayu Regency, Indonesia. *The Journal of Developing Areas*. Vol. 49/3. pp. 217-228.
- Mosley, Paul. 2001. Risk Attitudes in the 'Vicious Circle of Poverty'. University of Sheffield Press. Sheffield.
- Myrdal, Gunar. 1964. Economic Theory and Underdeveloped Regions. Allen and Unwin. London.
- Naranjo, Sofia. 2012. Enabling food sovereignty and a prosperous future for peasants by understanding the factors that marginalise peasants and lead to poverty and hunger. *Journal Agriculture and Human Values*. Vol. 29. pp. 231-246.
- Nurjihadi, M. 2011. Dampak Usahatani Tembakau Virginia Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Studi Kasus di Desa Kabar Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur [skripsi]. Universitas Mataram. Mataram.
- Nurkse, Ragnar. 1961. Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries. Oxford University Press. New York.
- Oluwatayo, I.B, dan Ojo, A.O. 2016. Is Africa's Dependence on Agriculture the Cause of Poverty in the Continent? An Empirical Review. *The Journal of Developing Areas*. Vol. 50/1. pp. 93-102.
- Purwanto, Erwan A. 2007. Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk Pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 10/3. pp. 295-324.
- Roy B C, dan Pal S. 2002. Investment, Agricultural Productivity and Rural Poverty in India: A State-Level Analysis. *Indian Journal of Agricultural Economics* Vol. 57/4. pp. 653-678.
- Ruddle, Kenneth. 2011. Informal Credit System in Fishing Communities: Issues and Examples From Vietnam. *Journal of Human Organization*. Vol. 70/3. pp.224-232.
- Sadanandan, Anoop. 2014. Political Economy of Suicide: Financial Reforms, Credit Crunches and Farmer Suicides in India. *The Journal of Developing Areas*. Vol. 48/4. pp. 287-307.
- Susrusa K.B, Zulkifli. 2009. Efektifitas Kemitraan Pada usahatani Tembakau Virginia di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal SOCA*. Vol. 09/01. pp. 73-80.
- Suvarna K.V, dan Thomas, N. Tobacco Farming in India: An Unreliable Option to Growers and Workes, Expensive Proposition to Farmers and a Death Warrant to Forest. *Path Canada Research Report*. Kanada.
- Warr, Peter. 2011. "Poverty, Food Prices and Economic Growth in Southeast Asian Perspective". dalam: *Indonesia Update Series; Employment, Living Standars and Poverty in Contemporary Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies. Singapore.
- World Bank. 2000. World Development Report 2000/01: Attacking Poverty. World Bank.